

**EKSISTENSI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Basyarnas D.I. Yogyakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

LAELA VITA VETTI

C100160304

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

EKSISTENSI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Basyarnas D.I. Yogyakarta)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh :

LAELA VITA VETTI
C100160304

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**EKSISTENSI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Basyarnas D.I. Yogyakarta)**

**OLEH
LAELA VITA VETTI
C100160304**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 10 Agustus 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Mutimatun Ni'am, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Nuswardhani, S.H., S.U.
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Aristya Windiana Pamuncak, S.H., LL.M., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)**

()
()
()

Dekan,



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH., M.Hum)

PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 Agustus 2020

Penulis



LAELA VITA VETTI
C100160304

**EKSISTENSI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Basyarnas D.I. Yogyakarta)**

Abstrak

Pada prinsipnya proses penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua jalur yaitu jalur pengadilan (litigasi) dan jalur diluar pengadilan (non-litigasi) yang sering disebut juga dengan penyelesaian sengketa alternatif / ADR (*Alternative Dispute Resolution*). BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) sebagai lembaga arbitrase islam yang menangani penyelesaian sengketa ekonomi islam berlandaskan hukum islam dengan prinsip – prinsip syariah. Dengan adanya Basyarnas dapat menjadi salah satu alternatif bagi para pelaku usaha ekonomi syariah untuk menyelesaikan sengketanya secara cepat, efisien fleksibel dan biaya ringan apabila tidak dicapai kesepakatan melalui musyawarah. Namun disamping adanya kelebihan melalui proses arbitrase juga masih terdapat kekurangan yang dapat kendala – kendala yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan kendala-kendala yang terjadi serta efektifitas dan eksistensi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis, dengan analisa kualitatif deskriptif.

Kata kunci: penyelesaian sengketa, ekonomi syariah, basyarnas

Abstract

In principle, the dispute resolution process is divided into two channels, namely the court (litigation) and the path outside the court (non-litigation) which is often referred to as alternative dispute resolution / ADR (*Alternative Dispute Resolution*). BASYARNAS (National Sharia Arbitration Board) as an Islamic arbitration institution that handles the resolution of Islamic economic disputes based on Islamic law with sharia principles. With Basyarnas, it can be an alternative for sharia economic entrepreneurs to resolve their disputes quickly, efficiently, flexibly and at a low cost if no agreement is reached through consultation. But besides the advantages through the arbitration process there are also still shortcomings that can be obstacles that occur in the process of settling the dispute. The purpose of this study is to find out how the processes and constraints that occur as well as the effectiveness and existence in the resolution of Islamic economic disputes through Basyarnas. The research method used in this study is juridical research, with descriptive qualitative analysis.

Keyword : dispute resolution, sharia economic, basyarnas

1. PENDAHULUAN

Sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia perkembangan hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip – prinsip syariah

terlihat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun pada dasarnya pertumbuhan keuangan syariah belum dapat mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional, hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar (market share) keuangan syariah yang secara keseluruhan masih di bawah angka 5%.

Secara normatif dalam penjelasan pasal 49 huruf i Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pengertian ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi seluruh lembaga keuangan berbasis syariah seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Kata “sengketa” menurut bahasa inggris disebut dengan “conflict” dan “dispute” keduanya mengandung pengertian tentang adanya perselisihan atau percekocokan, atau perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih (Mujahidin, 2010). Dapat dibedakan konflik adalah situasi antara dua pihak atau lebih yang mempunyai perbedaan kepentingan, kemudian pihak yang merasa dirugikan dan menyatakan tidak puas kepada pihak lain yang dianggap sebagai penyebab kerugian dinamakan sengketa. Dapat dikatakan sengketa merupakan kelanjutan dari konflik yang mana sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan (Zaidah, 2015).

Pada prinsipnya proses penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua jalur yaitu jalur pengadilan (litigasi) dan jalur diluar pengadilan (non-litigasi) yang sering disebut juga dengan penyelesaian sengketa alternatif / ADR (*Alternative Dispute Resolution*) (Safudin, 2018).

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur pengadilan (litigasi) diatur dalam pasal 49 huruf i Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara ditingkat pertama antara orang –orang yang*

beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infak, sedekah, dan ekonomi syariah”.

Sedangkan untuk penyelesaian diluar jalur pengadilan (non-litigasi) dapat diselesaikan melalui arbitrase syariah yang pengaturan dan prosedur penyelesaiannya secara umum mengacu pada Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS). Dalam pasal 1 angka 1 UUAPS tercantum pengertian arbitrase yaitu salah satu penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak dengan menunjuk pihak ketiga sebagai arbiter/majelis arbiter untuk mengambil putusan yang bersifat final dan mengikat (Safudin, 2018).

Dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, arbitrase syariah juga mendapat tempat sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa perbankan syariah diluar Pengadilan Agama. Pengakuan terhadap keberadaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase syariah tersebut juga terlihat dari banyaknya fatwa – fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menetapkan agar penyelesaian sengketa dilakukan melalui badan arbitrase syariah bila gagal mencapai kesepakatan melalui musyawarah (Kholis, 2018).

Namun penggunaan jalur litigasi mempunyai ciri khas yaitu cenderung berkarakter *win-lose solution* (menang-kalah) sedangkan penggunaan jalur diluar pengadilan (non-litigasi) cenderung berkarakter *win-win solution* (Safudin, 2018), karena penyelesaian sengketa nonlitigasi selalu mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak (Zaidah, 2015).

Di Indonesia BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) merupakan lembaga arbitrase islam yang menangani penyelesaian sengketa ekonomi islam berlandaskan hukum islam dengan prinsip – prinsip syariah (Nurhayati, 2019). Para pelaku kegiatan ekonomi pada dasarnya menginginkan setiap sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dengan cepat, efisien, dan biaya murah. Para pihak yang bersengketa dapat secara bebas memilih cara

penyelesaian dan hukum yang akan digunakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian, namun kadangkala untuk mencapai kesepakatan tersebut, banyak kendala yang dihadapi oleh para pihak.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas?, dan (2) Apa saja kendala – kendala yang terjadi dan eksistensinya dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas?, dengan tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menjelaskan bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas, dan (2) Untuk mengetahui apa saja kendala - kendala yang terjadi dan eksistensinya dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas. dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Manfaat Teoritis, yakni diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas ilmu dibidang hukum keperdataan khususnya hukum arbitrase, (2) Manfaat Praktis, yakni diharapkan masyarakat maupun pembaca dapat mengetahui lebih jauh mengenai proses, dan kendala-kendala yang terjadi serta eksistensinya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara serta analisa data dilakukan secara kualitatif yang dilakukan dengan logika deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas

BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) merupakan badan arbitrase syariah pertama di indonesia yang kemudian mengalami perubahan nama menjadi Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) melalui SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003. Basyarnas adalah lembaga hakim yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan

pihak-pihak manapun. Basyarnas adalah perangkat organisasi MUI sebagaimana DSN (Dewan Syariah Nasional), LP-POM (Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat – Obatan dan Makanan), YDDP (Yayasan Dana Dakwah Pembangunan) (Hak, 2011).

Basyarnas mempunyai peraturan prosedur yang memuat ketentuan – ketentuan sendiri dalam menyelesaikan sengketa sebagai berikut :

- a. Proses arbitrase dimulai dengan menyampaikan surat permohonan oleh pihak yang memulai proses (Pemohon) untuk menyelenggarakan arbitrase di sekretariat Basyarnas.
- b. Tahap selanjutnya yaitu penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis. Kemudian masuk acara pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup.
- c. Kemudian masuk ke dalam tahapan jawab menjawab oleh Termohon dan dilanjutkan replik oleh Pemohon dan duplik oleh Termohon.
- d. Selama masa persidangan arbiter harus selalu mengupayakan perdamaian diantara para pihak. Jika pada sidang pertama Pemohon tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah sementara telah dipanggil secara patut, maka permohonan arbitrase dinyatakan gugur dan arbiter akan memutuskan perkara arbitrase tidak dapat diterima.
- e. Selanjutnya pada tahap pembuktian, para pihak dapat mengajukan bukti dan saksi/ahli.
- f. Selama belum dijatuhkan putusan, Pemohon dapat mencabut permohonan arbitrase.
- g. Apabila arbiter menganggap pemeriksaan telah cukup, maka arbiter / majelis arbiter akan menutup pemeriksaan perkara dan menetapkan suatu hari sidang untuk membacakan putusan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak ditutupnya proses pemeriksaan.
- h. Isi putusan Basyarnas sekurang - kurangnya memuat : Kalimat Basmallah yang berbunyi : *Bismillahirrahmanirrahim* diatas putusan, Kepala putusan berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Nama lengkap dan alamat para pihak, Uraian singkat sengketa, Pendirian para pihak, Nama lengkap arbiter, Pertimbangan dan kesimpulan arbiter tunggal atau arbiter majelis mengenai keseluruhan sengketa, Pendapat tiap – tiap

arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat majelis arbiter, Amar putusan, Tempat dan tanggal putusan, Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

- i. Arbiter dalam mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan dan arbiter dilarang untuk memberikan putusan yang tidak dituntut untuk melebihi tuntutan yang diminta oleh para pihak (*ultra petita*).
- j. Putusan Basyarnas yang sudah ditandatangani oleh arbiter bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa serta wajib ditaati serta dilaksanakan secara sukarela. Salinan putusan yang telah ditanda – tangani oleh arbiter diberikan kepada Pemohon dan Termohon. Salinan ini tidak boleh dipublikasikan kecuali atas kesepakatan kedua pihak dan untuk menjaga martabat para pihak itu sendiri. Selanjutnya lembar asli putusan tersebut di daftarkan paling lambat 30 hari sejak putusan dibacakan di kepaniteraan Pengadilan Agama, agar putusan tersebut dapat dieksekusi apabila suatu waktu ada pihak yang tidak melaksanakan isi putusan.

Terdapat gambaran pelaksanaan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah di negara lain, yakni sebagai berikut :

3.1.1 Arbitrase Syariah di Malaysia

Di Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase syariah jika dibandingkan dengan proses arbitrase syariah di negara Malaysia, sebagian besar hampir sama dengan peraturan prosedur syariah Basyarnas di indonesia. Pada tahun 2007 Pusat Arbitrase Regional Kuala Lumpur mengeluarkan peraturan baru tentang arbitrase perselisihan bisnis keuangan islam. Menurut pasal 1 ayat 3 “peraturan ini berlaku untuk arbitrase kontrak komersial, keperluan bisnis atau transaksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah” (Oseni, 2011).

Namun disamping itu juga terdapat perbedaan yaitu, dari segi eksistensi putusan arbitrase dalam pasal 38 Aturan Pusat Arbitrase Regional Kuala Lumpur KLRC (Perbankan Syariah dan Jasa Keuangan), arbiter / majelis arbiter memberikan putusan dalam waktu yang relatif lama yaitu 3 bulan atau 180 hari sejak waktu persidangan selesai dan putusan arbitrase yang dibuat secara tertulis bersifat final dan mengikat langsung para pihak.

Kemudian salinan putusan yang ditandatangani oleh arbiter akan diserahkan kepada direktur pusat arbitrase regional kuala lumpur untuk didaftarkan. Selanjutnya pusat akan memberitahu para pihak bahwa putusan telah tersedia dan tunduk pada biaya penyelesaian yang akan ditentukan oleh pusat. Oleh karena itu, dapat dikatakan putusan arbitrase syariah di Malaysia langsung mendapat kekuatan eksekutorial pada saat putusan dibacakan dan ditandatangani arbiter saat itu juga sampai didaftarkan ke Pusat Arbitrase Regional Kuala Lumpur. Dengan adanya pusat ini memungkinkan untuk mendapatkan putusan oleh para ahli keuangan islam yang sesuai secara hukum dan secara substantif dengan ketentuan syariah, juga dimungkinkan efektif dan fleksibilitas dalam melakukan proses arbitrase sengketa ekonomi syariah (Bukhari, 2020).

3.1.2 Arbitrase Syariah di Amerika

Di Amerika Serikat, Undang – Undang Arbitrase Federal / *Federal Arbitration Act* (FAA) dan aturan khusus negara yang didasarkan pada *Uniform Arbitration Act*, menciptakan kerangka hukum dimana arbitrase swasta dapat beroperasi dengan dukungan sistem pengadilan resmi. FAA melindungi integritas arbitrase dengan memastikan bahwa pengadilan akan menegakkan putusan yang menghasilkan proses arbitrase untuk mentransformasikannya kedalam bentuk penyelesaian sengketa yang keberhasilannya bergantung pada niat baik dari pihak yang bersengketa menjadi suatu yang pada akhirnya didukung oleh kekuatan penegakkan pemerintah (Broyde, 2014).

Umat muslim di Amerika yang berusaha mengembangkan proses penyelesaian perselisihan islam yang akan dihormati oleh Pengadilan Amerika mungkin dapat belajar dari pengalaman komunitas Yahudi-Amerika yang taat beragama dan telah berhasil membangun institusi arbitrase tersendiri yaitu *Beth Din Arbitrase* (BDA), menyediakan forum adjudikatif yang efektif bagi orang Yahudi-Amerika yang berkomitmen untuk hidup sesuai dengan halakha dalam konteks hukum dan sosial sekuler Amerika. Kelangsungan hukum atas proses arbitrase BDA bertumpu pada enam pilar utama, yaitu : (Broyde , 2014)

- a. Pertama, mengembangkan aturan prosedur formal yang canggih secara hukum yang melindungi hak-hak para pihak atas proses hukum.
- b. Kedua, mengembangkan proses banding internal

- c. Ketiga, menunjukkan rasa hormat terhadap norma-norma hukum agama dan sekuler
- d. Keempat, mengakui kebiasaan umum standar perdagangan yang adil
- e. Kelima, memanfaatkan arbiter dengan keahlian professional yang luas di bidang agama dan sekuler
- f. Keenam, mengambil peran aktif dalam memerintah dan mewakili komunitas keagamaan mereka.

3.2 Kendala dalam Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Basyarnas

3.2.1 Kurangnya law enforcement dalam eksekusi putusan

Salah satu kendala yang terjadi pada arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yaitu bahwa badan arbitrase tidak memiliki perangkat atau dasar hukum untuk melakukan tindakan paksa atas putusannya seperti penetapan sita, pelaksanaan lelang misalnya. Di dalam pasal 60 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan pasal 19 peraturan prosedur Basyarnas menyatakan bahwa putusan arbitrase / Basyarnas yang sudah ditandatangani oleh arbiter bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Terlepas putusan wajib ditaati dan dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, maupun jika salah satu pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela yang mana akan menjadi suatu kendala dalam penyelesaian sengketa ekonomis syariah, atas putusan tersebut juga harus di daftarkan ke pengadilan. Oleh karena itu eksistensi kewenangan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terlihat tidak sepenuhnya independen tanpa adanya keikutsertaan pengadilan pada eksekusi dan pembatalan putusan Basyarnas. Dan juga seakan – akan menempatkan posisi Basyarnas sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa berada di bawah lembaga pengadilan, dimana yang seharusnya merupakan lembaga otonom, independen dan bebas campur tangan dari pihak manapun.

Salah satu contoh kasus penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terjadi yaitu antara PT. Atriumasta Sakti melawan PT. Bank Syariah Mandiri telah diselesaikan oleh Basyarnas pada tanggal 16 September 2009 dengan putusan perkara No.16/Tahun2008/BASYARNAS/Ka.Jak. kemudian putusan tersebut

didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No.792/Pdt.G/2009/PA.JP dengan amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan menyatakan bahwa Termohon (PT. Bank Syariah Mandiri) melakukan cidera janji serta menghukum Termohon untuk mengembalikan dana sebesar Rp.878.791.366 kepada Pemohon dan membayar biaya perkara pengadilan. Namun karena salah satu pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela maka dapat memintakan permohonan pelaksanaan eksekusi putusan dan atau mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama.

Selanjutnya atas putusan Basyarnas tersebut dimintakan permohonan pembatalan putusan Basyarnas oleh PT. Bank Syariah Mandiri karena menurut fakta persidangan mengungkapkan bahwa yang menjadi alasan permohonan pembatalan putusan tersebut karena putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa dan kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009 Pengadilan Agama Jakarta Pusat membacakan putusannya dengan amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan serta menyatakan putusan Basyarnas tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dapat disimpulkan bahwa dikarenakan Basyarnas tidak memiliki perangkat hukum untuk melaksanakan eksekusi putusannya secara mandiri dapat menjadi kendala karena masih ada keterlibatan pengadilan. Dan dari kasus tersebut majelis hakim akhirnya mengabulkan permohonan pembatalan putusan Basyarnas dengan alasan tipu muslihat, namun alasan tipu muslihat tersebut tidak didukung bukti – bukti berupa putusan pengadilan terhadap alasan tersebut. Padahal apabila permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tidak didukung putusan pengadilan, maka seharusnya permohonan pembatalan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan Basyarnas tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam penjelasan pasal 70 Undang – Undang Nomor 30 tahun 1999 dan hakim telah keluar dari norma yang ada.

Kendala ini relevan dengan pendapat ahli Eman Suparman mengatakan bahwa idealnya putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat itu sudah

bersifat eksekutorial sehingga putusannya benar – benar mandiri dan tidak tergantung pada kewenangan pengadilan (Suparman, 2012). Arbitrase yang telah diakui keberadaannya sebagai forum penyelesaian sengketa di luar peradilan, tidak hanya diakui sebagai forum pemutus perkara, tetapi lebih dari itu juga berwenang penuh untuk melaksanakan / mengeksekusi putusan (Al-Gifari, 2017). Dan dengan adanya titel eksekutorial “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam isi putusan arbitrase syariah, maka seharusnya tidak memerlukan penetapan pengadilan untuk memerintahkan pelaksanaan putusan tersebut (Soraya, 2014).

Namun dari hasil wawancara dengan narasumber pihak Basyarnas mengatakan bahwa terlihat pada perkembangannya keefektifan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sekitar 80% putusan Basyarnas sudah banyak diselesaikan dengan putusan perdamaian dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak.

3.2.2 Kurangnya sosialisasi pengetahuan arbitrase di masyarakat

Dari segi eksistensi Basyarnas sebagai lembaga arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, masih terlihat belum banyak masyarakat yang paham dan mengetahui tentang keberadaan lembaga arbitrase syariah Basyarnas sebagai lembaga alternative penyelesaian sengketa non-litigasi yang efisien, cepat dan fleksibel serta sangat diperuntukan bagi pelaku bisnis/usaha dikalangan dunia bisnis.

Berdasarkan keterangan dari pihak Basyarnas, sekitar lebih dari 80% pengusaha wanita di Yogyakarta tidak mengerti mengenai apa itu arbitrase. Selama Basyarnas perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dibentuk, terlihat masih minimnya perkara yang masuk, dengan data jumlah perkara dari tahun 2015 sampai 2019 terdapat 16 perkara, yaitu dengan rincian :

- a. Tahun 2015 dan 2016 Basyarnas masih belum aktif dalam kepengurusan dan dalam menyelesaikan sengketa.
- b. Tahun 2017 terdapat 10 perkara
- c. Tahun 2018 tidak ada perkara yang masuk
- d. Tahun 2019 terdapat 6 perkara yaitu, 2 sengketa mengenai murabahah semua antara Bank BRI Syariah dengan nasabah, namun atas perkara tersebut

dilakukan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah di Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kemudian 1 perkara mengenai murabahah antara Bank BCA Syariah dengan nasabah. Dan KSPPS Bina Umama 3 perkara dengan nasabah berhasil melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sudah dilakukan eksekusi ke Pengadilan Agama Yogyakarta. Dan untuk data di tahun 2020 masih belum ada permohonan perkara penyelesaian yang masuk ke Basyarnas Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

4. PENUTUP

Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada dasarnya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dengan Pengadilan Agama maupun jalur non litigasi dengan arbitrase syariah yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Basyarnas menggunakan acara pemeriksaan cepat, berjalan secara sederhana, praktis, dan penuh kekeluargaan / fleksibel yang relatif lebih cepat apabila dibandingkan dengan proses melalui pengadilan. Salah satu kelebihan arbitrase juga yaitu bahwa putusan arbitrase bersifat final dan binding, yang berarti bahwa terhadap putusan tersebut tidak mempunyai upaya hukum seperti banding dan kasasi yang dimiliki pengadilan serta putusan arbitrase mengikat bagi para pihak.

Kendala – kendala yang masih terjadi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Basyarnas Yogyakarta antara lain, *kurangnya law enforcement dalam eksekusi putusan* dimana atas putusan Basyarnas harus di daftarkan ke pengadilan, oleh karena itu eksistensi kewenangan Basyarnas terlihat tidak sepenuhnya independen tanpa adanya keikutsertaan pengadilan, disamping keefektifan Basyarnas sekitar 80% putusan Basyarnas sudah banyak diselesaikan dengan putusan perdamaian dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Kemudian kendala lainnya yaitu *kurangnya sosialisasi pengetahuan arbitrase di masyarakat*, sekitar lebih dari 80% pengusaha wanita di Yogyakarta tidak mengerti mengenai apa itu arbitrase dan prinsip-prinsipnya, serta terlihat dengan masih minimnya

perkara yang masuk, dengan data jumlah perkara dari tahun 2015 sampai 2019 terdapat 16 perkara.

Berdasarkan teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto dapat disimpulkan bahwa atas eksistensi dan keefektifan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih belum efektif dimana terdapat tidak terpenuhinya beberapa faktor yaitu, dari faktor hukum sudah efektif dalam proses acara penyelesaian sengketa sesuai pada Undang – Undang kekuasaan kehakiman yaitu berdasarkan asas sederhana cepat, dan biaya ringan, namun hukum dikatakan efektif jika hukum tersebut sudah bergerak dimasyarakat dan sudah dijalankan masyarakat sesuai substansi hukum, bukan hanya di dalam hukum tertulis saja. Kemudian dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dan pada faktor masyarakat dapat dikatakan masih belum efektif karena Basyarnas tidak memiliki perangkat dan dasar hukum tersendiri untuk dapat melaksanakan eksekusi putusan apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase syariah secara sukarela dan atas itu masih memerlukan keterlibatan lembaga Pengadilan sebagai lembaga eksekutor putusan arbitrase. Oleh karena itu atas kendala yang terjadi dapat menjadi kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus dikurangi sebanyak mungkin agar merangsang masyarakat lebih banyak menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa-sengketanya.

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

Pertama, bagi DPR sebagai lembaga legislatif dapat membuat suatu pembaharuan hukum yang konsisten agar menjadi payung hukum yang pasti sehingga tidak membingungkan masyarakat atas adanya dualisme hukum pada Basyarnas sebagai lembaga alternatif dalam proses penyelesaian sengketa dan pelaksanaan putusannya sehingga dapat dilaksanakan eksekusi tanpa adanya campur tangan pengadilan.

Kedua, Basyarnas hendaknya meningkatkan kualitasnya dalam proses arbitrase syariah dengan menambah beberapa fasilitas untuk menunjang optimalnya kinerja lembaga arbitrase syariah tersebut yang merupakan badan peradilan swasta diluar pengadilan umum dan perangkat organisasi Majelis Ulama

Indonesia (MUI). Salah satunya dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan bagi arbiter tetap maupun calon arbiter sehingga dapat meningkatkan kualitasnya dalam menambah wawasan ilmu dan memperketat persyaratannya agar dapat memenuhi kriteria yang ditentukan undang – undang, serta meningkatkan keahliannya untuk dapat menjelaskan dan meyakinkan kepada para pihak dengan sejelas-jelasnya agar dapat menerima dan menjalankan putusan secara sukarela sehingga tidak ada upaya hukum dijalur litigasi. Dan juga dengan meningkatkan kinerja kepada para pengurus untuk lebih giat mensosialisasikan basyarnas dalam meningkatkan eksistensi dan keefektifannya sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan baik di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mujahidin. (2010). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor : Ghalia.
- Al-Gifari, Muhammad Faqih. (2017). *Skripsi : Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional*.
- Broyde, Michael J. (2014). *Pillthe Pillars Of Successful Religious Arbitration : Models From American Islamic Arbitration Based On The Beth Din Of America And Muslim Arbitration Tribunal Experience*, Harvard Journal on Racial & Ethnic Justice Vol. 30, January 2014. <https://www.researchgate.net/publication/264117464>, Diakss 23 Juni 2020 pukul 17.00 WIB
- Bukhari, Khutubul Zaman, *Arbitration And Mediation in Malaysia Asean Law Association* http://www.aseanlawassociation.org/docs/w_4malaysia.pdf, Diakses Tanggal 4 Juni 2020 Pukul 23.00
- Hak, Nurul. (2011). *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta : Teras.
- Kholis, Nur. (2018). *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Melalui Cara Non Litigasi Di Basyarnas Dalam Perpektif Hukum Islam*. Tesis. (Purwokerto: IAIN, 2018).
- Nurhayati. (2019). *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.3 No.1 Januari 2019
- Oseni, Umar A. , Ahmad, Abu Umar Faruq. (2011). *Dispute Resolution in Islamic Finance : A Case Analysis of Malaysia*, Article Online in 8th International Conference on Islamic Economic and Finance Desember 2011, https://www.researchgate.net/publication/265143356_DISPUTE_RESO

LUTION IN ISLAMIC FINANCE A CASE ANALYSIS OF MALAYSIA Diakses Tanggal 4 Juni 2020 Pukul 18.00

- Safudin, Endrik. (2018). *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Malang : Intrans Publishing.
- Soraya, Andi Tenri, dkk. (2014). *Basyarnas Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, Jurnal Analisis, Desember 2014, Vol.13, No.2.
- Suparman, Eman. (2012). *Arbitrase dan Dilema Pengakuan Hukum*, Jakarta : Fikahati Aneska.
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas Perubahan kedua Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
- Zaidah, Yusna. (2015). *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah*, Sleman Yogyakarta : Aswaja Pressindo.